

PRAKTEK DIPLOMASI DARI PERADABAN TIMUR : INDIA KUNO, CHINA KUNO, DAN ISLAM

Oleh : Drs. Denny Ramdhany, M.Si

E-mail : Denny.brc10@gmail.com

ABSTRACT

The paper describes the development of diplomacy from the emergence of human civilization to the contemporary era. Experts in International Relations Studies have different perspectives regarding the sequence of development in the practice of DiplomatiK. Western writers tend to start discussing the evolution of diplomacy starting from the ancient Greek era by setting aside the DiplomatiK thoughts and activities of eastern civilization, such as ancient India, ancient China, dan Islam. In fact, the three civilization also contributed greatly to both the thinking and the development of DiplomatiK representation in 1961 adopting Kautilya's ideas. Likewise ancient China thought contributed to aspect of international relations and DiplomatiK. In Islam, DiplomatiK is nont only related to worldly affairs, but also to matters of the hereafter. Therefore, diplomacy has strong historical roots in Islam. Based on this, the author will try to describe the thoughts of experts, especially regarding the practice of diplomacy in ancient India, ancient China, and Islam as additional references that have not been discussed by western thinkers.

Key words: *DiplomatiK evolution, eastern civilization, levels of DiplomatiK representation*

ABSTRAK

Tulisan ini menggambarkan perkembangan diplomasi mulai dari munculnya peradaban manusia hingga di era kontemporer. Para pakar Studi Hubungan Internasional memiliki perspektif yang berbeda mengenai urutan perkembangan praktek diplomasi. Penulis barat berkecenderungan untuk memulai pembahasan evolusi diplomasi mulai dari era Yunani Kuno dengan mengesampingkan pemikiran dan kegiatan diplomasi dari peradaban timur, seperti India Kuno, China Kuno, dan Islam. Padahal ketiga peradaban tersebut juga memberikan kontribusi yang besar baik pemikiran maupun perkembangan praktek diplomasi, khususnya dalam hal tingkatan perwakilan DiplomatiK tahun 1961 mengadopsi pemikiran dari Kautilya. Begitu juga pemikiran China Kuno yang memberikan kontribusi kepada aspek hubungan internasional dan diplomacy. Dalam Islam, diplomasi tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi, tetapi juga berhubungan dengan perkara akherat. Sebab itu, diplomasi memiliki akar sejarah yang kuat dalam peradaban Islam. Berdasarkan hal itu, penulis akan mencoba menguraikan pemikiran para pakar terutama mengenai praktek diplomasi di India Kuno, China Kuno, dan Islam sebagai penambahan referensi yang selama ini tidak dibahas oleh para pemikir barat.

Kata Kunci: evolusi diplomasi, peradaban timur, tingkatan perwakilan diplomatik.

PENDAHULUAN

Sejak awal peradaban manusia telah diyakini bahwa tidak ada satu pun manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena sebagai makhluk social akan selalu memerlukan interaksi dengan manusia lain. Demikian pula halnya dengan negara tidak dapat hidup sendirian sepenuhnya terlebih di dunia sekarang ini.⁴⁰ Bentuk perilaku demikian dikenal dengan istilah diplomasi.

Istilah diplomasi diyakini berasal dari bahasa Yunani, *yang berarti dilipat*.⁴¹ Kata diplomasi kemudian seringkali mengandung pengertian yang bervariasi. Seperti suatu negosiasi yang dilakukan diatas meja hijau di kamar yang berornamen, di mana di era diplomasi modern mencakup didalamnya komunikasi antara dua negara atau lebih.⁴²

Diplomasi mempunyai kesan yang yang tidak baik. Kata ini banyak digunakan untuk mengungkapkan berbagai makna yang sebagian besar tidak bersesuaian dengan moralitas dan nilai-nilai etika. Gambaran yang pertama muncul saat disebutkan diplomasi/diplomat adalah pesona dan kegantengan, licin dan penuh akal bulus, kelicikan, bujukan dan pujian yang sifatnya menjilat, penipuan dan muslihat yang semuanya memiliki akar dari tradisi Yunani.⁴³

Menurut Harold Nicolson dalam S.L. Roy dan GVG. Krishnamutry, secara tepat menggambarkan sejarah asal mula diplomasi sebagai berikut:

Pada era Kekaisaran Romawi, semua pemilik paspor yang melintasi jalan milik negara serta surat jalan harus dicetak pada plat logam ganda, dilipat kemudian dijahit dengan cara yang khas. Plat logam ganda ini disebut “*diplomas*”. Selanjutnya kata “diploma” kemudian berkembang yang juga mencakup dokumen resmi lainnya yang bukan logam, khususnya memberikan hak istimewa tertentu atau menyangkut kesepakatan dengan suku bangsa asing diluar bangsa Romawi.⁴⁴

S.L. Roy lebih lanjut menguraikan bahwa sehubungan dengan kekaisaran Romawi banyak melakukan berbagai perjanjian-perjanjian, persoalan dokumentasi atau kearsipan menjadi problem tersendiri karena tersimpan dalam logam-logam kecil yang di design secara khusus. Oleh karena itu, perlu ada seseorang yang terlatih untuk mengindeks, menguraikan, dan memeliharanya. Isi surat resmi negara yang

⁴⁰ S.L. Roy., *Diplomasi: Diplomacy*, Harwanto dan Mirsawati (Penterjemah), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991. Hlm 31

⁴¹ *Ibid.*, hlm 1; GVG Krishnamurty., *Modern Diplomacy: Dialectic and Dimensions*, Sagar Publications New Delhi, 1980. Hlm, 39

⁴² John T. Rourke., *International Politics on The Stage World, Second Edition*, The Dushkin Publishing Group Inc, 1989. Hlm. 307

⁴³ Afzal Iqbal., *Diplomacy In Early Islam; Diplomasi Islam*, Samson Rahman (Penterjemah), Penerbit Pustaka Al. Kautsar, Jakarta, 2000. Hlm. xxi

⁴⁴ *Loc.Cit*; Op.Cit, 39-40

dikumpulkan, disimpan di arsip yang berhubungan dengan hubungan internasional, di zaman pertengahan disebut sebagai *Diplomatikus atau diplomatique*. Siapapun yang berhubungan dengan surat-surat tersebut dikatakan sebagai milik res diplomatique atau bisnis Diplomatik.⁴⁵

Menurut Earnes Satow dan Burke dalam Roy, mengatakan bahwa kata diplomasi untuk menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan 1796 yang dicatat sebagai pertama kali penggunaan dalam Bahasa Inggris dalam arti yang sekarang ini.⁴⁶ Sepertinya istilah perjanjian ini berkorelasi dengan istilah aslinya *International Law* yang juga pertama kali dinyatakan oleh pakar hukum Inggris, Jeremy Bentham pada tahun 1780.⁴⁷ Dengan demikian, apabila kita berbicara suatu perjanjian antar negara, dengan sendirinya tidak dapat dilepaskan dengan Hukum Internasional.

Walaupun hukum internasional dalam pengertian modern baru berumur sekitar empat abad, tetapi akar-akarnya telah terdapat semenjak zaman Yunani Kuno dan Zaman Romawi. Di zaman Yunani kuno, ahli-ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato telah mengemukakan gagasan-gagasan mengenai wilayah, masyarakat, dimana dalam interaksinya diatur oleh ketentuan-ketentuan yang kemudian bernama hukum internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut pengaturan-pengaturan perang dan penghormatan terhadap utusan-utusan negara.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, diduga meskipun kata diplomasi berasal dari Bahasa Yunani, tidak berarti bahwa kegiatan semacam belum pernah dilakukan di peradaban bangsa lain di peradaban timur, jauh sebelum peradaban barat pertama kalinya di abad pertengahan. atau Eropa bahkan sudah sudah terjadi sejak peradaban manusia muncul, sehingga diduga bahwa saat manusia mulai melakukan kegiatan hidup berkelompok, maka interaksi antar mereka, termasuk didalam negosiasi, untuk berbagai tujuan, seperti penghentian permusuhan, pembicaraan mengenai padang rumput, pertukaran istri, dan lain-lain yang dilakukan antar kelompok manusia yang berbeda, dapat dijadikan indicator bukti adanya diplomasi pada zaman pra sejarah. Persoalannya adalah sulit untuk menemukan bukti tertulis tentang perilaku diplomasi dari peradaban India Kuno, China Kuno, dan Islam di dalam literature yang berasal dari Yunani dan Romawi.⁴⁹

Dengan demikian, Utusan atau duta merupakan peranan politik pertama paling nampak dalam lingkungan masyarakat. Diantara masyarakat sederhana, baik yang bersahabat maupun bermusuhan, komunikasi tetap diperlukan, dan personil khusus dengan keahlian yang dimilikinya, seperti kemampuan dalam bidang agama, perundingan, atau kemahiran berbahasa yang ditetapkan untuk memimpin pembicaraan mengenai berbagai masalah yang timbul.⁵⁰

⁴⁵ S.L.Roy, Op.Cit. Hlm 1

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ Boer Mauna., *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi ke-2, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005. Hlm. 2

⁴⁸ *ibid.*, Hlm 5

⁴⁹ Afzal Iqbal., *Op. Cit.* Hlm. xviii

⁵⁰ K.J. Holsti., *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis: International Politics A frame for Analysis*, (Wawan Juanda, penterjemah), , Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1991, hlm 224

Diplomasi sebagai suatu komunikasi memiliki tiga elemen, yaitu **pertama** negosiasi; **kedua**, signaling; **ketiga**: diplomasi publik.⁵¹ dianggap berhasil dalam menjalankan misinya, manakala pihak-pihak yang terlibat sampai pada suatu saling pengertian. Apabila kompromi memuaskan pihak-pihak yang terlibat dapat dikatakan bahwa diplomasi sangat berhasil, meskipun dalam banyak kasus kompromi tidak selalu dicapai melalui negosiasi.⁵²

Praktek diplomasi era kontemporer, berbeda dengan era kuno, di mana praktek diplomasi lazim digunakan dalam upaya mencapai tujuan nasional, mewujudkan atau menetapkan kepentingan, perilakunya hendak di tangkal, diubah, atau diperkuat, dimana banyak instrument komunikasi yang dapat dipergunakan untuk mencapai harapan, kehendak, atau ancaman. Pada beberapa konperensi pers, pertemuan politik, atau jamuan makan, para pejabat pemerintah membuat pernyataan yang ditujukan tidak hanya kepada para tamu domestic, tetapi juga kepada pemerintah asing dan masyarakat secara keseluruhan normal memperluas pengaruh di luar negeri dilakukan melalui jalur Diplomatik atau melalui komunikasi langsung antara menteri luar negeri dengan kepala pemerintahan.⁵³

PERMASALAHAN

Apabila kita membaca berbagai buku mengenai Hubungan Internasional, sebagian besar didalamnya mencakup pembahasan mengenai Diplomasi, seperti dalam buku karangan K.J Hoslti, Couloumbis dan Walfe, Daniel S Papp, John T. Rouke, Bruce Russett dan Harves Starr, dan Joseph S. Nye, Jr baik yang ditulis dalam Bab tersendiri, maupun diintegrasikan dengan pembahasannya dengan politik luar negeri. Ini menunjukkan bahwa diplomasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas hubungan antar negara mulai di dari era kuno sampai dengan kontemporer, terutama dengan kebijakan suatu negara ke lingkungan eksternal.

Persoalannya adalah adanya ketimpangan referensi dan informasi yang diterima oleh masyarakat, khususnya para mahasiswa serta pemerhati diplomasi lainnya yang mempelajari praktek diplomasi, karena buku yang ditulis penulis barat seringkali lebih memfokuskan kepada kiblat barat serta mengabaikan kontribusi dan peranan dari peradaban timur atas perkembangan dan praktek diplomasi. Hal ini baru dapat dipahami apabila melihat perilaku Orang-orang Ibrani memasukkan kultur mereka sendiri, saat mereka di bawah Musa dan Kitab Taurat. Orang-orang Yahudi tidak mau mengakui orang di luar kelompok mereka dan menyatakan sumpah bermusuhan terhadap beberapa bangsa, seperti Amelika, mereka menolak menjalin hubungan dalam keadaan perang ataupun damai. Demikian pula orang-orang Yunani memandang orang-orang non Yunani sebagai kaum barbaric. Aristoteles percaya bahwa alam ini telah menjadikan orang-orang Barbar sebagai budak.⁵⁴

Sikap egosentris ini paling tidak nampak dari tulisan para pakar Hubungan Internasional Barat yang tidak membahas kontribusi peradaban India Kuno, China Kuno, dan Islam atas praktek diplomasi yang diterapkan. Sepertinya ada garis pemisah

⁵¹ T. Rouke *Loc.Cit*

⁵² *Op.Cit*, hlm 19

⁵³ *Ibid*, hlm 223

⁵⁴ *ibid*

antara peradaban timur dan barat dimana peradaban timur itu dimulai dari India Kuno sampai peradaban Islam, serta abad pertengahan yang ditandai dengan adanya Perjanjian Westphalia (1648) yang memunculkan *Nation-State* sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional sampai Perang Dunia kedua. Bersamaan dengan itu, Hukum Internasional internasional baru berkembang mulai abad ke 16 dan 17 setelah lahirnya negara-negara dengan system modern di Eropa yang banyak dipengaruhi oleh karya-karya tokoh-tokoh kenamaan di Eropa.⁵⁵

Kondisi ini dapat dipahami karena Hukum Internasional modern secara fakta berasal dari Eropa Barat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita menyimak sejarah mereka, ditemukan fakta bahwa seluruh karya yang ada dalam hukum internasional dan diplomasi berakar kepada Negara-Kota (City-State) Yunani, kemudian diikuti oleh periode Romawi dan melompat ke zaman modern, dengan mengabaikan kontribusi Islam setelah Romawi Barat runtuh tahun 470 M dan tidak ada pembahasan yang mendesak terhadap hukum yang disebut dengan hukum internasional.⁵⁶ Asumsi yang dibuat mereka adalah bahwa abad pertengahan ada kevakuman. Sebagai akibat adanya garis penghubung ini, wajar apabila kalangan akademis, tanpa kecuali mahasiswa dan dosen mengalami kesulitan referensi tertulis untuk memahami berbagai peristiwa yang terjadi di peradaban timur. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, khususnya mengenai asal usul dan jenjang perkembangan diplomasi sepanjang masa, terutama peradaban kuno perlu dicari penulis dari belahan timur non Eropa dan Amerika Serikat. Mengingat keterbatasan akses data, paling tidak tulisan singkat ini mencoba menggunakan referensi yang ditulis oleh para ahli diantaranya penulis dari India, yaitu GVG Khishnamurthy yang lebih komprehensif pembahasannya dan Samendra La Roy. Untuk pembahasan Diplomasi Islam, oleh tulisan Afzal Iqbal dari Lahore, Pakistan yang lebih fokus kepada diplomasi Era Nabi Muhammad SAW beserta para Khalifah dalam menyebarkan ajaran Islam. Untuk pembahasan Diplomasi Era China Kuno didukung oleh buku karangan K.J. Holsti yang pada bab awal penulisannya menguraikan perkembangan Politik dan diplomasi di China di era Dinasti Chou.

PEMBAHASAN

Seperti yang diuraikan di atas, ada beberapa karya tulis yang dibuat oleh ahli dari peradaban timur yang dapat dijadikan referensi untuk memahami, terutama di awal praktek diplomasi di awal (peradaban kuno) adalah Buku karangan GVG. Khishnamurthy dapat dijadikan salah satu rujukan kepada pihak yang ingin mendapatkan informasi yang relative lebih komprehensif mengenai Evolusi Diplomas, khususnya di fase peradaban India Kuno, China Kuno, dan Islam, dimana buku pakar Hukum Internasional, Diplomasi, dan Hubungan Internasional, Universitas Osmania, Hyderabad India ini membagi sejarah diplomasi kedalam 4 fase, yaitu:

- a) **Fase pertama**, mulai dari munculnya peradaban manusia di timur dan barat sampai dengan tahun 1815, dimana dalam kongres Wina ini, kegiatan diplomasi ditetapkan sebagai profesi;
- b) **Fase kedua**, dari tahun 1815 sampai 1919 termasuk didalamnya Perjanjian Versailles yang menjadi dasar terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa;

⁵⁵ Boer Mauna., *Op.Cit.*, hlm 5

⁵⁶ Afzal Iqbal, *Op.Cit* Hlm. xvii

- c) **Fase ketiga**, mulai tahun 1919 sampai tahun 1945 dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional setelah Perang Dunia II berakhir.
- d) **Fase keempat, dari tahun 1945 sampai sekarang.**⁵⁷ Pembabakan evolusi diplomasi ini lebih mudah untuk dipahami dan yang menjadi pembeda dibandingkan dengan buku lainnya adalah di buku karya GVG Khishnamurty membahas *Praktek Diplomasi di era Peradaban Islam* di *Chapter 2: History of Diplomatik Thought and Diplomacy*. Fase Pertama diuraikan secara berurutan. Praktek diplomasi di Era India Kuno, China Kuno, Yunani Kuno, Romawi Kuno, Era Islam, Diplomasi di Eropa Abad Pertengahan sampai dengan Kodifikasi Hukum Diplomatik pada saat Kongres Wina 1815. Namun karena pembahasan pemikiran dan praktek diplomasi di era Yunani Kuno, Romawi Kuno, sampai kodifikasi Hukum Diplomatik pada saat Konvensi Wina 1815, sudah banyak dibahas dalam literature Studi Hubungan Internasional.

Penulis lainnya, Samendra Lal Roy juga membahas Evolusi Diplomasi di fase pertama, tetapi pembahasannya dari Perkembangan dan praktek diplomasi di India Kuno, kemudian langsung ke Perkembangan di Yunani dengan melewati dua peradaban sebelumnya, yaitu China Kuno dan Islam.

Penulisan makalah ini hanya dibatasi pada ulasan tiga pemikiran dan praktek diplomasi dari 3 peradaban yaitu :

1. **Pemikiran dan Praktek Diplomasi Era India Kuno**

Samendra Lal Roy telah menguraikan beberapa bukti yang tertulis untuk menunjukkan bahwa kegiatan diplomasi telah berlangsung sejak lama di India, dimana pada periode Veda ditemukan referensi berbagai tipe utusan diplomasi, yaitu :

- Duta: Ahli dalam mengumpulkan informasi mengenai kekuatan musuh;
- Prahita : Seorang utusan yang dikirim oleh rajanya;
- Palgala : Pembawa pesan politik penting ke negara-negara tetangga;
- Suta : Menyebarkan informasi.⁵⁸

Pemikiran dan praktek diplomasi India Kuno ditemukan dalam *epics (syair kepahlawanan)*. Ramayana dan Mahabharata memuat referensi yang berkaitan dengan pekerjaan agen Diplomatik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam Epik dalam Ramayana, Raja dari kerajaan Ayodhya, Rama, saat di pengasingan dikunjungi oleh adiknya, Bharata memberikan wacana kepada saudaranya tentang prinsip-prinsip tata kelola negara yang akan digunakan untuk memerintah suatu negara. Lebih lanjut, ada 2 contoh, dimana duta sebagai agen diplomasi digunakan selama perundingan sebelum deklarasi perang antara pasukan Rama dari Kerajaan Ayodhya dengan Raja Ravana dari Kerajaan Demon.

Hanoman, adalah yang pertama secara khusus ditunjuk oleh Rama untuk mengunjungi instana Raja Rahwana dengan misi khusus. Setelah misi gagal, Hanoman terlibat dalam pengrusakan properti public dan juga membunuh sejumlah orang, kemudian Ravana menghukum mati Hanuman. Deklarasi perang terakhir dinyatakan

⁵⁷ GVG. Khishnamurty, *Op.Cit*, hlm. 7

⁵⁸ S.L. Roy, *Op.Cit*. Hlm. 50-51

oleh Rama terhadap Rahwana setelah kegagalan misi diplomasi oleh Hanuman dan Angada.⁵⁹

Dalam Epik Mahabharata, salah satu epic hindu lainnya, Sanjaya menjadi utusan Diplomatik Kauravas memohon kepada Pandawa untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai dan kembali kepada Kurawa dengan membawa pesan dari Pandawa. Kemudian misi Diplomatik serupa dilakukan oleh Krishna atas nama Pandawa ke istana Duryodhana, Raja Kurawa, dimana misi ini dilakukan dalam upaya menghindari perang besar antara dua keluarga pangeran. Ketika ada upaya oleh Kurawa untuk menyerang Krishna, sang duta, Vidura (penasehat menteri dari Kurawa) menyampaikan pendapat bahwa **seorang duta (Utusan Diplomatik) tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dikenakan hukuman dan harus diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat yang tinggi.**⁶⁰

Berdasarkan epic Mahabaratha nampak bahwa India Kuno sudah menerapkan prinsip perlindungan dan hak kekebalan Diplomatik yang diberikan kepada setiap utusan. Prinsip ini telah memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Diplomatik, terutama dalam menyusun aturan Diplomatik di dalam Konvensi Wina 1961.

Pada abad ketiga SM, Kaisar Asoka dari kerajaan Maurya Chandragupta mencoba menanamkan

dua gagasan baru dalam dunia diplomasi yaitu :

1. **Doktrin *non violence*** (tanpa kekerasan), tidak hanya dalam hubungan pribadi atau negara, tetapi juga dalam hubungan internasional ;
2. ***Non Injuri*** (tanpa menyakiti), dengan memelihara hubungan damai dengan satu dengan yang lainnya dan pembentukan persaudaraan universal.

Melalui dua gagasan ini menumbuhkan kesadaran bahwa hanya dengan mengikuti gagasan India akan ***Peaceful co-existence*** (hidup berdampingan secara damai) dan persaudaraan universal, peradaban kita bisa diselamatkan.⁶¹

Kautilya mengadopsi empat klasifikasi dari tingkatan duta yang sesuai dengan klasifikasi yang diadopsi, khususnya pada Kongres Wina tahun 1815 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, yaitu :

- a. Duta (***Ambassador***);
- b. Nisrishtartha (***Minister Plenipotentiary***);
- c. Paramitarthah (***Charge d’Affairs***) and;
- d. Sasanarhah (***Diplomatik Messenger or Helard***).

Kontribusi dari India Kuno adalah merujuk kepada **pendapat Kautilya** yang menyatakan bahwa para negarawan dapat mengadopsi enam kebijakan ketika berhubungan dengan negara lain, yaitu:

- 1) Sandhi (***Treaty of peace***);
- 2) Vighrah (***War***);
- 3) Asana (***Neutrality***);

⁵⁹ GVG. Khishnamurty, *Op.Cit*, hlm. 44-45; S.L. Roy, *Op.Cit*, Hlm 17

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ S.L. Roy, *Op.Cit*, hlm 52-53

- 4) Yana (*Marching*);
- 5) Samsrya (*Alliance*);
- 6) Dwaidibhaya (*making peace with one and end war with another*)

Implementasi diplomasi Era India Kuno banyak memberikan pengaruh jangka panjang kepada perkembangan hukum Diplomatik, terutama dalam hal penggongan atau tingkatan diplomatik ang ututannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ahli India.

2. Pemikiran dan Praktek diplomasi di Era China Kuno

Hanya sedikit tulisan tentang pemikiran dan praktek diplomasi yang ditulis oleh para penstudi diplomasi dari barat, satu diantaranya K.J. Holsti yang pada awal penulisannya sudah mengulas panjang lebar mengenai pemikiran dan praktek diplomasi di China Kuno, terutama di Era Dinasti Chou (1122 – 256 BC).⁶²

Dalam zaman Spring and Autumn serta Warring States, setiap unit politik independen pemimpin hubungan luar negerinya, tanpa rekoemdasi resmi dari pusat kekuasaan monarki, dimana dalam masa tersebut terdapat perkembangan hubungan diantara negara-negara feodal, tidak hanya formal dan hubungan diplomatik, tetapi juga hubungan ekonomi dan perdagangan;

Ciri lain dalam hubungan diplomasi, negara-negara China tidak pernah membuat hubungan diplomatik yang permanen, tetapi lebih bersifat sementara seperti untuk menyusun persekutuan, pernyataan perang, membuat perdamaian atau mengukuhkan prestise melalui berbagai upacara atau parade militer; Dalam hal praktek diplomasi, Kepustakaan China mencatat beberapa pertukaran diplomatik, seperti :

- ❑ *Ch'ao* : kunjungan balasan ke istana oleh pemimpin pemerintah suatu negara ke negara lain;
- ❑ *Hu'i* : Pertemuan tetap antara pemimpin pemerintahan dari dua atau lebih negara;
- ❑ *P'in* : Misi persahabatan dalam bidang penerangan dan penelitian;
- ❑ *Shih* : Pertukaran Duta;
- ❑ *Shou* : Pesta berburu yang dilakukan perwakilan pemerintah dengan menggabungkan urusan diplomatik dengan rekreasi.⁶³

Semua upacara dan jenis pertukaran diplomatik tersebut berlangsung begitu lama dan mengakibatkan terjadinya komunikasi diplomatik yang permanen, sedangkan Perang merupakan bentuk yang paling banyak terjadi dalam hubungan diantara unit-unit politik dalam zaman *Spring and Autumn* serta *Warring States*.

Pada Era Dinasti Chou barat, kekerasan hanya digunakan untuk menghadapi bangsa barbar atau menghadapi bangsawan yang memiliki kekuatan militer cukup besar dan dianggap membahayakan kepentingan kerajaan.

Dalam Sistem negara Independen, kekerasan sebagai metode untuk memperluas wilayah; Zaman Feodal, perang digunakan sebagai ujicoba kekuatan; Zaman Warring States, perang telah menjadi pertikaian besar, dan membunuh tawanan telah menjadi kebiasaan umum.⁶⁴

Salah satu cendikiawan terbesar yag kontribusinya terhadap filosofi China dianggap tidak ternilai adalah Kung Fu-Tzu (551 – 479 SM) yang dikenal sebagai Confucius.

⁶² K.J. Holsti, *Op.Cit.*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *ibid*

Confucius mengajukan berbagai teori tentang tata negara dan hubungan antar negara. Perkataan beliau kemudian diterbitkan dalam volume yang disebut *Analects*.⁶⁵

Confucius berpendapat bahwa organisasi suatu negara dan hubungannya dengan negara lain. "**Li**, yang dalam Bahasa China berarti dan mencakup kumpulan prinsip-prinsip moral, hukum, dan etika yang ditentukan untuk perilaku individu, kelompok social, dan negara. Konsep Li ini dapat diperlakukan setara dengan konsep **Dharma di India Kuno**. **Li** juga harus diikuti dalam menjalankan control politik oleh pemerintah dalam mengatur perilaku raja dalam berurusan dengan kaum feudal, perwira, dan rakyat.

Tema utama Confucius pada organisasi negara adalah bahwa harmoni politik antara bagian dari masyarakat yang berbeda harus memastikan kepada kepentingan yang lebih besar dari kesejahteraan rakyat dan itu menjadi dasar fundamental harus **Li**. Lebih lanjut, Li mengartikan lingkup kegiatan pemerintah pada otoritas, baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan pihak eksternal atau internasional. Menurut sejarah China, utusan dari Eropa Barat, India, dan negara-negara Asia Timur diterima oleh istana kekaisaran China yang diutus guna menyampaikan upeti atas nama negara masing-masing. Utusan Diplomatik juga dikirim dari istana Kaisar Harsha Vardhana dari kerajaan Thaneswar ke istana kekaisaran China.⁶⁶

Penulis lainnya, Lichi dalam bukunya **Yueh-Ling** mengulas secara lengkap berbagai fungsi dari negara, seperti administrasi peradilan, konservasi, irigasi, masalah imigrasi, persiapan militer, peningkatan pegawai negeri, hubungan Diplomatik dan masalah keagamaan.

Menurut **Li**, sebagai seorang penguasa tidak boleh menjalankan supremasi absolut dan menggunakan tindakan otoriter sehubungan dengan masalah domestic suatu negara, tetapi juga dalam hubungan dengan negara lain, apakah mereka koloni, Vassel, protektorat atau negara berdaulat lainnya. Menurut Confucius, perbedaan antara bangsa yang beradab dengan yang tidak, adalah bahwa yang pertama memiliki **Li**, sementara yang lainnya tidak memiliki **Li**.

Pemikir lainnya dari era China Kuno, Mencius (370-285 B.C). mengembangkan lebih lanjut ide-ide konfusianisme tentang filsafat politik menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian dengan negara asing, kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan tertinggi. Filosofinya diikuti oleh Hsun Tzu (350-235 BC). Teknik kenegaraan unggul yang diadopsi dalam hubungan dengan negara-negara asing tidak hanya meningkatkan kekuatan dinasti, tetapi juga memerluas kekaisaran China.

Dengan munculnya kerajaan yang kuat, Kaisar Shih Huang Tit (221-207 BC) merupakan kaisar pertama China yang meningkatkan teknik dan praktek dalam urusan antar negara dan hubungan internasional. Dengan membangun Great Wall of China, kekaisaran Shih Huang Tit memastikan bahwa kekaisaran China terlindungi dengan baik dari serangan negara-negara tetangga. Kemudian Kekaisaran Dinasti Han melakukan ekspansi ke Indo China, China Timur, Mongolia dan negara lainnya. Selama dinasti-dinasti China berkuasa, praktek mengirim dan menerima utusan untuk mempromosikan kepentingan China diikuti dengan motivasi yang besar.

Untuk memastikan bahwa utusan asing di Tiongkok tidak terlibat dalam kegiatan subversive, tingkat kewaspadaan yang tinggi tetap dilakukan kepada kegiatan utusan

⁶⁵ GVG.Khishnamurty, *Op.Cit*, Hlm 54.

⁶⁶ Ibid. Hlm 55.

asing. Kebijakan luar negeri kekaisaran Dinasti China memastikan melindungi dari serangan negara tetangga.

Kekaisaran China lebih menyukai kebijakan isolasi dari keseluruhan dunia karena ingin melestarikan kemurnian kekaisaran china sehingga tidak terpengaruh oleh arus perdaban lain.

Peranan dari utusan diplomatik di era China Kuno adalah berpartisipasi dalam perundingan sebelum atau sesudah terjadi peperangan. Namun tidak ada jaminan utusan Diplomatik dari negara lain yang membawa pesan atau bertujuan untuk bernegosiasi dengan China mendapatkan status yang memadai. Setiap kali suatu negara ditaklukan oleh China, kaisar biasanya menerima upeti dari negara yang kalah dalam bentuk hadiah, emas, budak, dander sebagai tanda pengakuan kedaulatan China.

Kemudian Mongol dipimpin oleh Chengiz Khan (1162-1227), Kublai Khan (1216 – 1294 M) menaklukan China dan mendirikan kerajaan Mongolia. Selama periode Mongolia, tidak memberikan respek atas utusan Diplomatik maupun utusan lain dari negara asing. Utusan Diplomatik atau utusan yang datang ke Kerajaan Mongolia, komandannya diserang atau di bunuh. Begitu pula halnya tidak menunjukkan rasa hormat kepada kekebalan atau hak istimewa Diplomatik yang seharusnya diperoleh para utusan sesuai dengan praktek yang lazim dilakukan.

Bahkan selama abad 14 dan 15, utusan diplomatik seharusnya mendapatkan kekebalan diplomatik kurang dihormati, terlebih lagi jika mereka berasal dari negara yang bermusuhan dengan China. Kebijakan ini berlangsung sampai abad 18 dan 19 dengan anggapan bahwa mereka telah mencemari supremasi budaya China.

Setelah berkembang hubungan China dengan negara-negara barat, pertukaran diplomasi bencaji suatu hal yang biasa dan terbuka. Kekaisaran China bersikeras pada penghormatan tingkat tinggi dan menunjukkan rasa hormat kepada utusan asing dan utusan yang membawa upeti kepada kaisar. Namun, Ketidakpercayaan yang melekat kaisar China terhadap orang-orang asing dan negara asing menghambat pertumbuhan pemikiran tentang hubungan internasional dan diplomasi.

Meskipun demikian, kontribusi pemikiran besar, seperti Confucius dan Mencius, Lao Tse dan para negarawan lainnya kepada diplomasi telah mempromosikan pemahaman perdamaian diantara negara, membantu melestarikan dan kemajuan kepentingan politik dan budaya Tiongkok yang memiliki nilai yang abadi.⁶⁷

3. Pemikiran dan Praktek Diplomasi di Era Islam

Sejarah Islam berisi kaya dengan referensi untuk berbagai praktek diplomasi yang digunakan dalam studi hubungan internasional. Abad ke 7, dimana system Diplomatik sangat berkembang dimana fakta menunjukkan adanya aliansi, hubungan timbal balik dan arbitrase dikembang dengan basis Syariah Islam. Perang melawan aggressor dianggap oleh hukum Islam sebagai perang yang adil jika untuk suatu tujuan, bahkan melibatkan penyiksaan dan penumpasan aggressor.⁶⁸

Menurut Al Qur'an, "Jika mereka condong kepada perdamaian, maka terima lah dan bertaqwalah kepada Allah . Sungguh, Dia Maha mendengar, maha Mengetahui".⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.* Hlm 57.

⁶⁸ GVG. Khrishnamurty, *Op.Cit* Hlm. 72

⁶⁹ Surat Al Anfal surat 8 ayat 61,

Dengan lahirnya Islam, menimbulkan perubahan secara revolusioner yang memperkuat prinsip hukum internasional dan Diplomasi. Islam dengan tegas menyatakan persamaan antar manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman :

“wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.”⁷⁰

Perbedaan yang ada antara orang-orang Yunani dan Barbar, Yahudi dan Amalika, Romawi dan Kristen Timur yang dianggap inferior dihapuskan. Prasangka berdasarkan warna kulit, ras dan Bahasa dikutuk.⁷¹ Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT :

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, dan nasrani dan orang-orang Shabiin siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shaleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”⁷²

Islam merupakan agama yang pertama menghadirkan ide negara universal atas dasar persamaan di antara manusia. Dalam hukum Islam lah, kita dapatkan pertama kali, hak-hak musuh, baik dalam keadaan perang maupun damai yang dijamin dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah. Perdamaian dalam semua manifestasinya selalu diberikan tempat yang paling penting dalam Islam. Allah SWT berfirman :

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁷³

Salah satu prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam adalah bahwa tindakan bermusuhan atau perang tidak boleh dilakukan tanpa alasan. Konsep Nabi Muhammad SAW tentang Hubungan Internasional didasarkan kepada tiga klasifikasi orang-orang di dunia, yaitu :

1. Muslim atau Non Muslim (*Status Dhimmi*);
2. Non Muslim yang mempunyai hubungan perjanjian dengan Islam (*Muahid Status*);
3. Non Muslim yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan Muslim.⁷⁴

⁷⁰ Al. Hujurat, Surat 49 ayat 13.

⁷¹ Afzal Iqbal, Op.Cit.Hlm. xix

⁷² Al Baqarah surat 2 ayat 62.

⁷³ Al Hujurat, surat 49, ayat 9

⁷⁴ GCG. Khrishnamurty, Op.Cit. Hlm 73

Selanjutnya dikemukakan bahwa hubungan antara negara Muslim dan negara Non Muslim didasarkan kepada Syariat Islam, dimana Hukum Islam dalam hubungan internasional mendasarkan diri pada konsep saling menghormati antara negara-negara berdaulat, dimana pada awal perkembangan Islam, hubungan diplomasi antar negara dijadikan sebagai pengganti atau penunjang perang.

Selama periode Abbasyiah dalam sejarah Islam, penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi selalu diutamakan dan penyelesaian perjanjian melalui pertukaran hadiah. Negara-negara Islam dengan bebas menggunakan teknik negosiasi dengan mengirimkan utusan ke negara lain dan setelah utusan itu kembali segera setelah melaksanakan misi Diplomatik, jadi sifatnya masih temporer.

Misi Diplomatik jangka pendek baik untuk menyelesaikan perselisihan atau membuat perjanjian atau untuk menyatakan perang ketika perundingan mengalami kegagalan. Menarik untuk dicatat bahwa agen-agen Diplomatik selama periode ini dipandang dengan kecurigaan. Oleh karena itu, mereka tunduk pada pengawasan yang ketat dan dilarang mengakses informasi atau kontak dengan anggota atau pejabat negara penerima.⁷⁵

Dalam terminologi hukum Islam, seorang agen diplomasi atau utusan diplomasi disebut Rasul atau Safir. Kata Irsal mengandung pengertian utusan atau agen dengan misi-misi khusus. Kata Safar mengacu kepada individu yang menjalankan misi-misi khusus, sedangkan safir umumnya dikirim dengan kekuasaan penuh untuk konsolidasi, negosiasi, dan untuk menerima penyelesaian sebagai tugas yang diembannya dari pemerintah pengirim.

Agen Diplomatik dan utusan memainkan peranan penting dalam perjanjian perundingan dan menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui peperangan. Pemilihan agen diplomasi baik Rasul maupun Safirs sebagai perwakilan khalifah atau Sultan haruslah individu yang memiliki integritas yang tinggi, dan loyalitas, mandiri, bijaksana, cakap, kompetensi, cermat, dan berani.

Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh seorang agen diplomasi atau utusan ketika menjalankan misinya, yaitu dilarang berhubungan atau kontak dengan wanita di negara penerima dan tidak minum yang memabukkan.

Sejarah mencatat bahwa munculnya kerajaan Islam berisi kegiatan pengiriman utusan Diplomatik ke negara-negara non Islam Fungsi utama para utusan adalah:

1. Meminta negara lain untuk memeluk Islam dan jika mereka gagal melakukannya, bersiap untuk konflik bersenjata atau deklarasi perang;
2. Jika negara lain menerima Islam, maka perundingan maupun perjanjian yang dibuat tanpa harus melakukan pembayaran Jizyah..

Pada umumnya misi diplomasi pada periode Islam dilakukan secara temporer Namun demikian, tetap memelihara hubungan diplomasi dengan kekaisaran Byzantium dan juga dengan kerajaan di Eropa.

Orang asing di negara Islam diberikan perlindungan tertentu tergantung kepada kebangsaan orang tersebut, keyakinan agama dan aktivitasnya. Diantara orang asing yang datang ke negara Islam dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai **Harbi, Mustamin, atau Dhimmi**.

Harbi adalah orang asing yang berperang dengan negara Islam lainnya. Menurut hukum Islam, apakah Harbi itu seorang musyrik atau bukan, akan berhak perlindungan

⁷⁵ *ibid*

atas keluarga, harta benda dan perjalanan ke luar negeri hanya jika diberikan izin khusus yang disebut Aman. **Kata Mustamin** dipergunakan jika harbi menjadi subjek musuh, sedangkan **kata Dhimmi berarti secara teknis seseorang** yang mengadakan perjanjian dengan orang yang beriman dan jika dia melanggar perjanjian tersebut, dia bertanggung jawab tidak hanya didenda tetapi juga dihukum.⁷⁶

Berdasarkan uraian singkat di atas, Nampak bahwa hukum Islam memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan prinsip-prinsip dan praktek-praktek hubungan internasional dan diplomasi.

PENUTUP

Dari hasil pembahasan didapatkan gambarkan bagaimana diplomasi dipraktikkan di Periode India Kuno, China Kuno, dan Islam yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan hubungan internasional dan diplomasi, di mana sumbangsih ketiga peradaban ini luput dari pembahasan dari para ahli hubungan internasional dan diplomasi dari peradaban Eropa. Artinya diplomasi tidak hanya menjadi bahasan Eropa Centris saja serta tidak hanya milik peradaban Yunani dan Romawi saja yang selama ini kita mendapatkan informasi yang tidak lengkap.

REFERENSI

Al Baqarah surat 2 ayat 62.

Al Hujurat, surat 49, ayat 9

Holsti, K.J., *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis: International Politics A frame for Analysis*, (Wawan Juanda, penterjemah), Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1991.

Iqbal, Afzal ., *Islam.*, Samson Rahman (Penterjemah), Penerbit Pustaka Al. Kautsar, Jakarta, 2000.

Krishnamurty, GVG., *Modern Diplomacy: Dialectic and Dimensions*, Sagar Publications, New Delhi, 1980.

Mauna, Boer., *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi ke-2, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005.

Rouke, John T., *International Politics on The Stage World, Second Edition*, The Dushkin Publishing Group Inc, 1989.

Roy S.L., *Diplomasi: Diplomacy.*, Harwanto dan Mirsawati (Penterjemaah), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991.

⁷⁶ *Ibid*, Hlm 80